

Kota Padang versi sejarah genap berusia 343 tahun pada 7 Agustus ini. Bagi sebuah daerah, usia akan dilihat dari kondisi daerah tersebut, terutama bagaimana wajah kota, tata ruang, sarana prasarana, tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah pada warganya. Pada akhirnya kematangan sebuah kota akan sendirinya menimbulkan kebanggaan bagi warganya. Bangga sebagai warga kota Padang, dan bangga memiliki KTP Padang.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “Padang” berarti suatu tanah yang datar dan luas, atau lapangan luas. Agaknya ini yang menginspirasi lahirnya nama kota Padang. Secara to-pog-rafi kota Padang merupakan dataran rendah yang dikelilingi bukit-bukit yang tidak begitu tinggi dan bermuara dua sungai yaitu Batang Kuranji dan Batang Arau.

Pada Abad ke-14 (1340—1375) di Minangkabau ada kerajaan di bawah pemerintahan Adityawarman. Pada masa itu wilayah Pa--dang cuma dikenal sebagai kampung nelayan, orang menye-but--nya Kampung Batung. Ketika itu Padang diperintah oleh Pe-ng-hulu Delapan Suku dengan sistem pemerintahan nagari.

Sekitar abad ke-15 dan 16, kerajaan Aceh dibawah pe-me-rin-tahan Iskandar Muda me-luas-kan wilayah kekuasaan dan perdagangannya sampai ke pesisir pantai barat Mi-na-ng-ka-bau seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Padang sebagai dae-rah pantai masa itu telah dising-ga-hi oleh pedagang-peda-gang dari daerah lain yang akan terus ke Aceh.

Akhir abad ke-16 masa jaya Kerajaan Aceh mulai turun, daerah-daerah yang dikuasai kerajaan Aceh mulai me-le-pas-kan diri, dan pada wak-tu ber-samaan di nusantara ini mulai beroperasi perusahaan dagang Belanda, dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Ost In-disehe Company*). VOC menerapkan politik *divide at impera* (pecah belah) dalam perluasan per-dagangan dan kekuasaannya. Akibatnya timbul ketegangan masyarakat di kota-kota pesisir pantai Sumatera. Kerajaan Aceh dipropaganda oleh VOC seolah akan menguasai Padang. VOC beralih membantu masyarakat menghadapi Aceh.

VOC menyadari dan melihat Padang sangat strategis dan dijadikan pusat perdagangan dan pemerintahan. Pulau Cing-ku-ak, dan Batang Arau lebih baik dijadikan sebagai daerah pelabuhan. Melalui penghulu terkemuka Padang yang bernama Orang Kayo Kaciak VOC dapat izin mendirikan loji pertama pada tahun 1667 di kota Padang. Inilah titik awal Padang tumbuh sebagai sebuah kota. Belanda tidak saja meluaskan perdagangannya melalui VOC, tetapi mulai dapat memerintah masyarakat. Dari Muara Padang ini pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda digerakkan ke seluruh pelosok Sumatera bagian tengah.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat karena Belanda tidak lagi berdagang, tetapi sudah menjajah. Rakyat mulai melakukan perlawanan. Puncaknya terjadi 7 Agustus 1669.

Dalam catatan sejarah, saat itu masyarakat Pauh dan Koto Tangah berhasil menguasai loji-loji Belanda di Muara serta banyaknya Belanda yang dibunuh. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai tahun kelahiran Kota Padang. Setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi kota Padang, yang tahun ini sudah berusia 343.

Di usia 343 ini, Padang masih dihadapkan dengan berbagai persoalan perkotaan. Layaknya persoalan yang dihadapi kota-kota lain baik di Sumatera Barat, Indonesia maupun di dunia. Hanya saja jenis persoalan, cara penyelesaian, dan gaya kepemimpinan yang membuat persoalan itu terlihat berbeda. Padang yang tengah berbenah diri menjadi kota industri, kota perdagangan dan kota pariwisata harus dihadapkan dengan persoalan-persoalan besar yang tak kalah dari kota-kota besar lainnya di dunia.

Plus minus Padang dari sisi geografis dan kekayaan alamnya menjadi tantangan bagi walikota dalam memimpin pemerintahan. Dari periode ke periode di setiap tampuk kepemimpinan seorang walikota, fokus persoalan yang dihadapi jelas berbeda, irama kepemimpinan pun berbeda sesuai zaman dan tantangan yang dihadapi saat itu. Namun yang jelas, setiap era

kepemimpinan tersebut, selalu ada program fundamental yang direalisasikan. Biasanya program itu dikenang setelah wali-kota yang bersangkutan habis jabatan atas sudah meni-nggal dunia.

Dalam catatan sejarah sete-lah kemerdekaan diprok-la-mir-kan, Padang sebagai sebuah wilayah tetap setia bera-da di bawah pemerintahan RI. Wali-kota pertama adalah, Mr Abu-bakar Ja'ar (1945—1946), men-jabat beberapa bulan saja. Mr Abubakar Ja'ar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. Selanjutnya Padang dipimpin Bagindo Aziz Chan (1946-1947) yang dikenal se-bagai Walikota Pejuang. Be-liau gugur 17 Juli 1947 di tangan penjajah Belanda.

Setelah Bagindo Aziz Chan gugur, Belanda melakukan ag-resi I, akibatnya secara *de facto* Belanda menguasai Padang. Untuk itu pemerintahan kota Padang dipindahkan ke Pa-dang-panjang dengan walikotanya Said Rasyad (1947). Peme-rin-ta-han Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresinya ke II. Walikota berikutnya adalah Dr A Hakim (1947—1949) dan memerintah tidak terlalu lama. Setelah pemulihan ke-daulatan RI tahun 1949 Pa-dang dipimpin oleh Dr Rasyid-din sebagai walikota yang ke lima (1949-1956)

Melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No 65/GP-50 ditetapkan pemerintahan kota Padang sebagai suatu daerah otonom dengan walikota keenam (1956—1958). Pada tahun 1958-1966 Padang dipimpin oleh ZA StPangeran sebagai walikota ke tujuh. Berikutnya walikota Padang adalah Drs Azhari sebagai walikota ke delapan dan pada tahun 1967-1971 Padang dipimpin oleh Drs Achirul Yahya.

Keluarnya UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, kota Padang di samping daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif dikepalai oleh seorang wali-kota dan waktu itu diangkat sebagai walikota Padang ke sepuluh adalah Drs Hasan Basri Durin (1971—1983). Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1980 Padang diperluas menjadi 694,9-6 Km² terdiri dari 11 kecamatan dengan 193 kelurahan.

Setelah Drs Hasan Basri Durin selesai melaksanakan tugasnya sebagai walikota Padang, maka diangkatlah Syahrul Ujud SH sebagai Walikota kese-belas dengan kepemimpinannya selama sepuluh tahun (1983—1993). Berakhirnya ke-pe-mim-pinan Syahrul Ujud, SH tongkat estafet diserahkan kepada Drs Zuiyen Rais, MS (1993—2003) yang merupakan Walikota Padang ke dua belas. Sejak 2003 sam-pai sekarang, dua kali perio-de, Padang dipimpin Dr Fauzi Bahar, MSi, sebagai walikota ke-13 dan ke-14.

Fauzi Bahar menjadi wa-likota yang sejak ke-pe-mim-pinannya masa-masa kebebasan demokrasi. Demonstrasi dari berbagai pihak tak asing bagi putra Koto Tengah yang ber-darah militer ini. Beruntung sejak dilantik sebagai pemimpin sipil, secara berangsur angsur darah militernya mulai ber-kurang. Di satu sisi dalam hal ge-rak cepat, naluri militer masih melekat dalam dirinya. Tetapi dalam menangani persoalan kemasyarakatan, garis ko-man-donya bukan lagi komando militer. Namun tak jarang ke-bija-kan kebijakannya disambut kontroversi.

Memberantas togel secara besar besaran di Padang sempat membuahkan hasil. Permainan judi tersebut sempat nyaris habis dari Kota Padang meski bela-kangan kembali tumbuh. Bisa

saja rentetan musibah yang menimpa kota Padang menyebabkan konsentrasi dan fokus kerja seorang walikota terbagi di usia 343 tahun ini. Sebab bukan hanya ancaman gempa dan tsunami yang menjadi kegalauan warga Padang, bencana bentuk lain seperti galodo dan longsor selalu mengintai dan membuat Pemko berjibaku mengantisipasi dan menanganinya.

Bergairahnya program hafalan juz amma (ayat ayat pendek), pesantren ramadhan dan berbagai kegiatan majelis ta'lim merupakan buah program yang dicanangkan Fauzi Bahar, meski ada yang menilai program tersebut cukup menjadi program di kementerian agama. Justru pemikiran lain melatarbelakangi program tersebut, setidaknya mempersiapkan generasi muda yang agamis. Maklum, sebelum masuk dunia militer, Fauzi ditepa di dunia pendidik/guru.

Terobosan yang dilakukan walikota Padang, termasuk menggebut pembangunan fisik berupa sarana prasarana bukanlah hal yang gampang. Ia memerintah bukan di era Syahrul Ujud sebagai walikota, atau Azwar Anas sebagai gubernur Sumbar. Era itu persoalan tanah tak pernah jadi penghalang pembangunan untuk umum. Kini, sejengkal tanah dan sebatang pohon sangat berharga nilainya, dan hampir setiap orang yang memiliki menuntut hak tersebut. Realistis atau tidak tuntutan itu, yang terpenting warga memprotes dan bahkan berani bertarung di ranah hukum.

Memerintah hampir satu juta orang bukanlah hal yang mudah. Upaya walikota Fauzi Bahar hingga periode kedua pemerintahannya dalam pembentukan akhlak perlu dilanjutkan, karena membentuk akhlak bukanlah pekerjaan yang instant. Di sisi lain, Pemko Padang harus tetap membuka diri dan introspeksi atas pelaksanaan program selama ini.

Gaya kepemimpinan ala pendidikan, Tut Wuri Handayani (di depan sebagai contoh) yang dipraktekkan selama ini perlu kombinasi dengan ing ngarso sungtulodo (memberikan dorongan dari belakang), dan ing madyo mangunkarso (sama sama terjun). Pemimpin atau walikota harus terus memberikan keteladanan, lalu didukung dan dikelilingi oleh orang-orang atau pejabat yang punya akhlak baik pula. Fauzi Bahar bukanlah superman atau super-boy, ia juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Sebelum terlanjur bertindak atas kebijakan yang dibuat, staf atau pembantu terdekat hendaknya berani memberikan masukan yang riil.

Kurun waktu pemerinta-han Fauzi Bahar sebagai wali-kota yang tersisa harus diman-fa-atkannya dengan baik. Sem-boyan “Padang Kota Tercinta, Kujaga dan Kubela” jangan hanya di atas kertas atau bali-ho. Tapi masuk ke hati masya-rakat kota Padang, yang bang-ga se-bagai warga kota Padang.

Sumber : [Padang Ekspres](#)